

NASKAH PUBLIKASI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi kasus di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul
Tahun 2018)

Oleh:

MOCH DECKY APRIADI
20140520031

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Dr. Suswanta, M.Si

NIK: 1670812199403 1 003

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP.,M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studikasuk di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2018)

Moch Decky Apriadi, Dr. Suswanta, M.Si

deckymoch@gmail.com

Abstrak

Partisipasi menjadi dasar landasan modal utama pada setiap proses perencanaan pembangunan Daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh *stakeholder*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam hal ini masyarakat dipaksa tanpa adanya dorongan dari hati nurani untuk ikut serta terlibat dalam proses tahapan pembangunan di daerah. Hal berbera terjadi di Desa Guwosari, tingkat partisipasi pada setiap unsur masyarakat yang ada dalam partisipasi pembangunannya relatif tinggi. Realisasi dalam setiap kebijakan Desa Guwosari banyak yang lahir dari saran dan usulan warga setempat. Penelitian ini dapat ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbangdes serta dari beberapa proses tahapan pembangunan, yaitu : 1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan 3) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa

A. PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 2 menjelaskan bahwa salah satu dari kewajiban masyarakat desa yaitu mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di desa serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting dengan maksud untuk membantu melancarkan

pembangunan yang telah direncanakan dan disusun oleh Pemerintah desa dan masyarakat desa, sehingga pada proses pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Pemerintah yaitu demi terciptanya pembangunan yang partisipatif.

Dalam hal ini peran masyarakat untuk keterlibatannya dimulai dari unsur yang terkecil yaitu, RT atau RW, Dukuh, Desa atau kelurahan, kecamatan sampai kabupaten kota. Masyarakat dilibatkan dalam pembangunan yang dilaksanakan di wilayah melalui Musrenbang. Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui

forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga. Musrenbang merupakan salah satu cara perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, hal ini bertujuan untuk menggali semua data dan informasi yang dibutuhkan seperti masalah yang kerap kali dihadapi, kebutuhan masyarakat dan potensi internal.

Musrenbang juga adalah salah satu cara bersama untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut disusun dan dirumuskan agar dapat diterima oleh semua pihak. Memberikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan memutuskan keputusan alternatif merupakan satu langkah untuk menjadikan rencana sebagai kepemilikan bersama. Sehingga melanggar sebuah 'rencana' secara tidak langsung berarti sebagai kepemilikan bersama. Sehingga melanggar 'rencana' berarti menentang kesepakatan masyarakat, bukan terbatas menentang keputusan dari pemerintah (Haeruman, 2004: 42).

Partisipasi masyarakat menjadi dasar modal utama pada setiap perencanaan pembangunan, akan tetapi pada pelaksanaannya seringkali dilakukan dengan rekayasa gerakan. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh peran stakeholder, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tidak sedikit program pemerintah

dalam pembangunan yang menggunakan pola pendekatan partisipatif, namun dalam prakteknya bukan bentuk partisipasi tetapi lebih kepada mobilisasi dan juga prosesnya bukan bottom-up tetapi top down. Seringkali masyarakat dipaksa tanpa adanya dorongan dari hati nurani untuk ikut berpartisipasi dalam program yang manfaatnya sedikit bagi masyarakat dengan dalih mengatasnamakan partisipasi (Kelly, 2001).

Beberapa kasus musrenbang seperti di Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan dan di Desa Monokerto, Sleman, menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan masih sangat minim dan kerap kali dimanipulasi demi kepentingan-kepentingan tertentu. Maka tidak mengherankan jika partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa hanya sebatas legal standing (Setiawan, 2005:8). Hal ini pula yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menurun. Situasi tersebut tentu akan menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif.

Jika melihat kasus di atas, sekalipun secara formal dalam perencanaan pembangunan sudah menggunakan pendekatan dengan melibatkan masyarakat, namun ternyata tidak menjadi jaminan bahwa

aspirasi dari desa atau kelurahan didengar. Begitu halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender. Dimana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan, yang pada tahap itu pun masih banyak perencanaan belum terlaksana dengan baik.

Melihat fakta diatas, peneliti berargumen bahwa partisipasi masyarakat di Desa Guwosari yang diejawantahkan melalui musrembangdes terbilang tinggi. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Guwosari dan faktor yang mempegaruhi partisipasinya. Alasan lain yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian di Desa Guwosari, Bantul dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menduduki tingkat pertama pada tahun 2015 di Kabupaten Bantul. Desa Guwosari menjadi desa berprestasi dengan mengirimkan LKD nya menjadi Juara Lomba Karang Taruna tingkat Kab.Bantul dan Tingkat Nasional pada Tahun 2016.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, menurut Sukmadinata, N. S. (2007:6) metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendiskripsikan yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Yusuf, M. A (2014:329) kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan cara serta disajikan secara naratif. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Guwosari Tahun 2018 lebih mudah karena dalam proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan dan metode ini dapat menjelaskan secara luas penelitian tersebut agar semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi terkait Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

B. KERANGKA TEORI

Partisipasi berarti peran seseorang atau kelompok dalam lapisan masyarakat untuk proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi sumbangsih pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumardi, 2010:46)

Partisipasi dikemukakan oleh (Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, 2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti sebagai pembuat keputusan menyarankan suatu kelompok atau masyarakat untuk ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Slamet (1994: 27-28) partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan dalam pembuatan keputusan dan melaksanakan keputusan itu, maka bentuk partisipasi ini dapat dikatakan sebagai partisipasi aktif. Apabila mereka dalam pembangunan terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada mereka, maka ini dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi pasif. Siagian (1985:10) menjelaskan secara rinci bahwa

partisipasi pasif merupakan sikap, perilaku dan tindakanya tidak mengakibatkan terhambatnya suatu proses kegiatan pembangunan, dan partisipasi aktif dijelaskan oleh siagian yaitu :

- a. Menunjukkan adanya rasa kesadaran pada setiap pribadi masyarakat dalam bersosial dan bernegara.
- b. Turut ikut dalam memikirkan nasib perseorangan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di lingkungan masyarakat sebagai sarana wadah untuk menyampaikan aspirasi.
- c. Taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Rela berkorban melakukan yang dituntut untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat bersama.
- e. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab, contohnya seperti membayar pajak untuk kepentingan negara dan orang banyak.

Dalam beberapa referensi yang ditemukan selalu menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program pembangunan. Akan tetapi dalam pengertian substantif yang dijelaskan menurut Eko Sutoro (2004:285) menjelaskan bahwa ada tiga substansi dari partisipasi yang

itu terdiri dari voice (suara), Acces (akses) dan control (kontrol), yaitu merupakan :

a. Voice (suara) setiap warga negara memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam bentuk aspirasi pada setiap proses pemerintahan. Hal yang sama, sebaliknya pemerintah harus mampu mengakomodasi setiap suara yang terus berkembang dalam masyarakat yang kemudian nantinya dijadikan sebagai dasar pembuat kebijakan .

b. Acces (akses) dimana setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuat kebijakan, termasuk dalam mengakses layanan publik.

c. Control (kontrol) setiap warga negara atau lapisan masyarakat memiliki kesempatan dan hak untuk dalam melakukan pengawasan terhadap jalanya suatu pemerintahan, maupun dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan Pembangunan Desa

Tahapan perencanaan adalah proses yang sangat penting dalam pelaksanaan perumusan kegiatan pembangunan Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka sudah tentu jelas hasilnya tidak akan

sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat serta tidak akan optimal dalam tujuan arah pembangunan. Dalam hal ini tahapan perencanaan menjadi faktor yang sangat penting untuk benar-benar dilaksanakan untuk terciptanya program atau kebijakan yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat serta menjadi kewajiban sebelum melaksanakan suatu pembangunan di Daerah.

Perencanaan memiliki peran penting untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan Desa. Tingkat partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari keikutsertaan masyarakat dalam berbagai hal pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ada banyak bentuk atau pola partisipasi masyarakat itu sendiri, contohnya saja bisa berupa dalam tenaga atau buah fikir dan gagasan. Maka dari itu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kunci keberhasilan pembangunan.

Hasail musyawarah Dusun (Musdus) direkap dan diserahkan kepada kepala desa Adapun beberapa usulan hasil dari beberapa dukuh seperti nampak pada Tabel dibawah ini :

3.2 Tabel Usulan Prioritas Hasil dari masing-masing Dusun
--

No.	Dusun	Usulan dari Dusun
1.	Karangber	Pembangunan Pengaspalan Jalan
2.	Watugedug	Pembangunan Pengaspalan Jalan
3.	Gandekan	Pembangunan Talud Sungai Bedog
4.	Kentolan Kidul	Pembangunan Selokan Jalan
5.	Dukuh	Pembangunan Telaga Desa Diponegoro
6.	Iroyudan	Pembangunan gorong-gorong dan talud jalan
7.	Bungsing	Pengerasan Jalan
8.	Kentolan lor	Pembangunan Pengaspalan jalan
9.	Pringgading	Pembangunan darainase, Jalan Pemukiman

Sumber : Data sekunder, 2019 dan hasil dari wawancara

Setelah hasil pendataan rekapitulasi usulan program prioritas disampaikan langsung ke Kepala Desa untuk dijadikan bahan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Kemudian kepala

Desa menyampaikan berkas tersebut ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam musyawarah desa dengan memfokuskan pada arah pembangunan di Desa, perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara proses partisipatif dan demokratis.

Ada perbedaan keterwakilan antara musdus dengan musdes, musdus biasanya dihadiri oleh unsur masyarakat yang ada dipedukuhan masing-masing, sedangkan untuk Musyawarah Desa pesertanya yaitu tokoh masyarakat, para kepala dukuh, ketua LPMD, ketua Karang Taruna, Ketua PKK dan lain sebagainya. adapun daftar peserta MusrenbangDes seperti pada Tabel dibawah ini :

No.	Asal Lembaga	Jumlah (orang)
1.	Perangkat Desa	16
2.	Kepala Dukuh	15
3.	Ketua RT	18
4.	LPMD	9
5.	PKK	3
6.	Karang Taruna	5

7.	Kelompok Tani	2
8.	Kepolisian	2
9.	Tokoh Agama	2
	Jumlah Peserta Musrenbang	72 orang

Sumber : Diolah dari hasil pendataan pelaksanaan kegiatan, 2018

Mendeteksi hal-hal permasalahan pada program tahun lalu haruslah dikaji secara matang dan sinergitas antar pengurus RT yang ada di dusun untuk melihat apa saja yang masih menjadi permasalahan pada setiap dusun. Hal ini selalu menjadi alasan bahwa tidak semua usulan masyarakat diterima karena pertimbangan pembangunan tahun sebelumnya, tetapi juga ini sering menjadi faktor utama dalam pembangunan suatu desa tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat pada umumnya. Hal itu yang biasanya memberikan konsekuensi logis membuat masyarakat enggan menyuarakan aspirasinya yang berbentuk usulan, gagasan dan saran di musyawarah yang di adakan oleh pemerintah Desa. Keadaan ini yang kemudian melahirkan pemikiran pada setiap pemikiran warga bahwa masalah pada forum musrenbang ini kurang akomodatif terhadap setiap usulan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas menjeaskan bahwa dengan bentuk atau pola partisipasi masyarakat yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di antaranya pembambilan keputusan pada seluruh proses kegiatan, yaitu harus adanya keterlibatan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan kebijakan sejak awal proyek perencanaan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa Guwosari. Salah satunya bentuk partisipasi pada tahapan perencanaan partisipasi ini dilakukan oleh seseorang yang tumbuh dengan kesadaran masing-masing untuk ikut serta dalam setiap kegiatan, adapun wujud partisipasi dapat berupa buah pemikiran, ide-ide dan tanggapan. Sesuai dengan teori dari Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.d (2011:61) yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan bermacam-macam, seperti halnya kehadiran rapat, seumbangan pemikiran atau gagasan, berdiskusi dan memberikan tanggapan.

Pada hakikatnya aspirasi memang harus diperjuangkan pemangku kepentingan dalam Musrenbangdes berupa usulan, masukan dan kritikan program pembangunan secara demokratis dan partisipatif. Fakta dilapangan pembangunan

yang melalui proses partisipatif adalah dengan adanya usulan dari ringkasan arus paling bawah yaitu dimulai dari RT, Dusun dan Desa. Hasil temuan di Desa Guwosari menunjukkan bahwa aspirasi dari bawah tersebut dapat terakomodasi dengan baik dalam musrenbangdes. Temuan ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa musrenbangdes hanya sebagai ajang rutinitas dan seremonial. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintahan Desa Guwosari dalam menampung seluruh aspirasi masyarakat sekaligus menjadi fasilitator yang mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa Guwosari.

Melihat keadaan tahapan perencanaan tersebut nampaknya pemerintah desa sudah pro aktif kepada masyarakat dengan lebih mendengar suara-suara masyarakat dengan cukup baik. Pemerintah desa dengan transparansi dan akuntabel lebih terbuka kepada seluruh masyarakat dan masyarakat lebih mengetahui informasi secara berkelanjutan mengenai apa saja yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

Pembangunan ditingkatkan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa itu sendiri, sedangkan pelaksanaan pada program pemerintah pusat yang masuk ke wilayah Desa ditransformasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pembangunan desa memiliki harapan agar pada setiap diri masyarakat memiliki rasa kepedulian dan rasa saling memiliki atas pembangunan pada setiap daerah, dan meningkatkan nilai-nilai sosial khususnya budaya gotong royong yang melekat masyarakat.

Dengan demikian partisipasi masyarakat menjadi unsur yang harus betul-betul diperhatikan dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu dalam keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, karena masyarakat merupakan objek tujuan utama dalam pelaksanaan arah kebijakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera khususnya di pedesaan. Pelaksanaan pembangunan juga merupakan implementasi dari setiap rangkaian terkait perencanaan program yang tersusun dalam RPJMDes dan RKPDes.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan

a. Pembangunan infrastruktur

Pembangunan Jalan Desa (Timur LP Pajangan) di ruas jalan desa yang sudah mulai rusak. Pembangunan fisik ini tentunya menggunakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) prakiraan pagu dana sebesar Rp.50.000.000. Hal ini dilakukan guna memperbaiki jalan yang sudah rusak. Hal ini yang menjadikan jiwa dari setiap masyarakat merasa terpanggil dengan sendirinya untuk terlibat dalam pembangunan fisik, mengingat jalan merupakan hal yang paling pokok untuk kenyamanan dan keamanan pengendara jalanan maupun pejalan kaki. Adapun pembangunan talus sungai untuk mencegah adanya banjir di wilayah tertentu yang masih rawan bencana.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di pemukiman menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat pada setiap kegiatan kerja bakti. Jiwa sosial untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sangat tinggi. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan warga di antaranya membersihkan rumput pinggir jalan yang sudah mulai tumbuh, menyediakan pasir dan semen, mengaduk dan mengecor jalan. Kegiatan ini biasa

dilakukan pada hari libur kerja agar masyarakat yang bekerja sebagai PNS bisa ikut hadir dalam agenda kerja bakti.

b. Partisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengembangan SDM (Sumbe Daya Manusia), salah satunya dalam program pengembangan batik atau lukis kaos. Motif batik asli Guwosari didasari untuk menjaga kelestarian atas kearifan lokal yang berasal dari budaya jawa. Ada pula sub bidang pemberdayaan perempuan melakukamn pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani . Adapun beberapa pengembangan Nilai-nilai kebudayaan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan
- b. Pelatihan Karawitan
- c. Penyelenggaraan grebeg selarong

Partisipasi dalam Evaluasi Pembangunan

Dalam isi permendagri No 113 Tahun 2014 mengatakan bahwa evaluasi dilaksanakan setelah pengimplementasian pemangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini bertujuan sebagi

bentuk koreksi atau evaluasi program yang ditujukan langsung kepada pemerintah Desa oleh masyarakat Desa Guwosari. Kemudian untuk peningkatan kinerja di periode yang akan mendatang agar lebih baik lagi. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan di Desa Guwosari melibatkan beberapa unsur yang ada yaitu BPD, kepala dusun dan perwakilan rakyat, yang dilaksanakan di pendopo Desa Guwosari.

Partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi ini dapat ditinjau dari kesediaan warga untuk memberikan *feedback*, penilaian dan masukan berupa rekomendasi atau mungkin keluhan sekalipun. Dari setiap kritikan dapat kembali meningkatkan kinerja pemerintah desa karena mengandung nilai tentang sejauh mana pencapaian arah pembangunan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Guwosari.

Yadav dalam Theresia (2014:198) menjelaskan bahwa partisipasi dalam evaluasi dan pemantauan pembangunan yaitu dapat berupa pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan bertujuan untuk memanfaatkan *output* dari program pada setiap pembangunan. Disini dapat dilihat

tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan daerah, apakah sudah sesuai dengan perencanaan diawal atau mungkin belum mencapai sasaran. Dengan kata lain, masyarakat berpartisipasi untuk sama-sama mengevaluasi hasil dari pelaksanaan pembangunan yang dampaknya terasa bagi masyarakat Des guwosari.

Partisipasi masyarakat Desa Guwosari ini tidak lepas dari kebedaraan lembaga masyarakat setempat seperti RT-RW, PKK maupun kelompok karang taruna hingga organisasi berbasis warga atau komunitas ditambah dengan kelompok berbasis pekerjaan seperti kelompok tani atau ternak yang ada di Desa Guwosari.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Guwosari pada bab pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Partisipasi pada tahapan perencanaan ini dilakukan melalui beberapa proses dimulai dari musyawarah tingkat pedusunan dan dilanjutkan dengan musyawarah ditingkat desa. Unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah dusun terdiri dari ketua-ketua RT dan para lembaga kemasyarakatan serta kelompok-kelompok lainnya yang ada ditingkatan dusun. Hasil dari musyawarah dusun lalu disampaikan pada forum musyawarah Desa. Partisipasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan Desa oleh perwakilan setiap masyarakat. Gagasan dan ide-ide yang bermuara pada setiap usulan masyarakat terakomodir dengan baik di dalam musrenbangdes. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengajak seluruh masyarakat agar hadir dalam forum musrenbangdes, mengusulkan beberapa program yang nantinya akan direalisasikan sesuai dengan skala prioritas. Pada akhirnya masyarakat merasa ini menjadi tanggung jawab bersama untuk sama-sama memajukan kesejahteraan Desa Guwosari.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa

Partisipasi pada tahapan ini dapat ditinjau dari adanya berbagai kegiatan program pembangunan baik fisik maupun non fisik, yaitu diantaranya :

- a. Pembangunan gorong-gorong dan talud jalan Iroyudan
- b. Pengaspalan jalan Watugedug
- c. Pembangunan talud Sungai
- d. Pembangunan saluran drainase
- e. Pembinaan dan pengembangan seni budaya
- f. Pembinaan pelatihan batik atau lukis kaos

Serta masih banyak kegiatan non fisik pada partisipasi masyarakat dalam program pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dalam hal ini masyarakat ikut terlibat langsung dalam setiap kegiatan, sumbangsih yang diberikan berupa gagasan, ide maupun finansial.

3. Partisipasi dalam evaluasi pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi ini sebagai bentuk *feedback* atau umpan balik. Hal ini bermula dari seberapa

puas masyarakat dalam kinerja pemerintah dalam melaksanakan setiap program. Partisipasi ini dapat dilihat dari kesanggupan masyarakat untuk memberikan kritikan, penilaian atau pendapat terkait pelaksanaan pembangunan di Desa Guwosari.

A. Saran

1. 1. Kepada Perangkat Desa Guwosari agar lebih banyak mengakomodir aspirasi masyarakat yang ada ditingkatan paling bawah yaitu pedusunan, sebagai landasan atau dasar pembuat perencanaan program kebijakan yang dapat melahirkan program yang diharapkan dan sesuai dengan masyarakat Desa Guwosari.
2. 2. Sistem Informasi desa yang harus segera dikelola dengan baik, agar masyarakat dapat mengikuti dan mengakses informasi terkait program pemerintah desa dengan mudah sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiningrum, Siti Irene Astusi. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Dwipayana, Ari. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE press
- Meleong. Lexy J. (2001). “*Metodologi penelitian kualitatif*”. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Meleong. Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitati Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muljana, B.S (1995). *Perencanaan Pembangunan Nasional: Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Fokus Repelita V*, Jakarta: UI press
- Rohmad, Zaini (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta: Ombak
- Safi'i. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah “Teori dan Aplikasi”* Malang: Averroes Press.
- Sugiyono. 2009. “*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*”. Jakarta : Rineka Cipta.
- SuI Nyoman. (2010:46). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Sut Eko (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press: Jakarta
- Slamet (2004). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Slamet, Y (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta; Sebelas Maret University Press.
- Sujarto, Djoko (1985). *Beberapa Pengertian tentang Perencanaan Fisik*. Jakarta: Bharatara Kqarya Askara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Yusuf, M. A (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiratnolo, Randy R dan Nugroho, Riant. 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dalam Panduan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Widjaja, Haw. (2010). *Otonomi Desa (Otonomi yang asli bulat dan utuh*. Jakarta: RajaGrafinfo Persada.

Jurnal

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Deviyanti, Dea. (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. *Journal Administrasi Negara Universitas Mulawarman 2013* Volume 1 Nomer 2 380-394.

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001) . *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.

Faradita, N. (2017). *Implementation Of Law Number 13 Year 2012 Regarding Special Regency Of Yogyakarta*. *E-Civics*, 6(4).

Pramana, Gilang (2013). *Pembangunan Fisik dan Non Fisik : Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Evaluasi PP No. 76 Tahun 2001)* .

Hermawan, Yudan & Yoyon, Suryono. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume 3 Nomor 1, Maret (97-108).

Akadun, (2011). *Revitalisasi Forum Musrenbang Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*

SKRIPSI

Arwanto, Posta. (2016). *Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*. Skripsi tidak dipublikasikan

Dian, Rahma. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016*. Skripsi tidak dipublikasikan

